



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI X DPR RI BIDANG PARIWISATA
KE KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 17 S.D. 19 JUNI 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
6. UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 17 Mei 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 oleh Komisi X DPR-RI adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari para pemangku kepentingan bidang pariwisata di kabupaten Malang Jawa Timur terkait perkembangan kebijakan Pemerintah, khususnya dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19.

C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Malang Jawa Timur pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, TVR Parlemen, Bagian Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol, Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Kunjungan kerja ini didampingi oleh Dadang Rizky Ratman selaku Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Pengembangan Usaha, dan Oneng Setya Harini, selaku Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf RI.

D. Metode Kunjungan Kerja

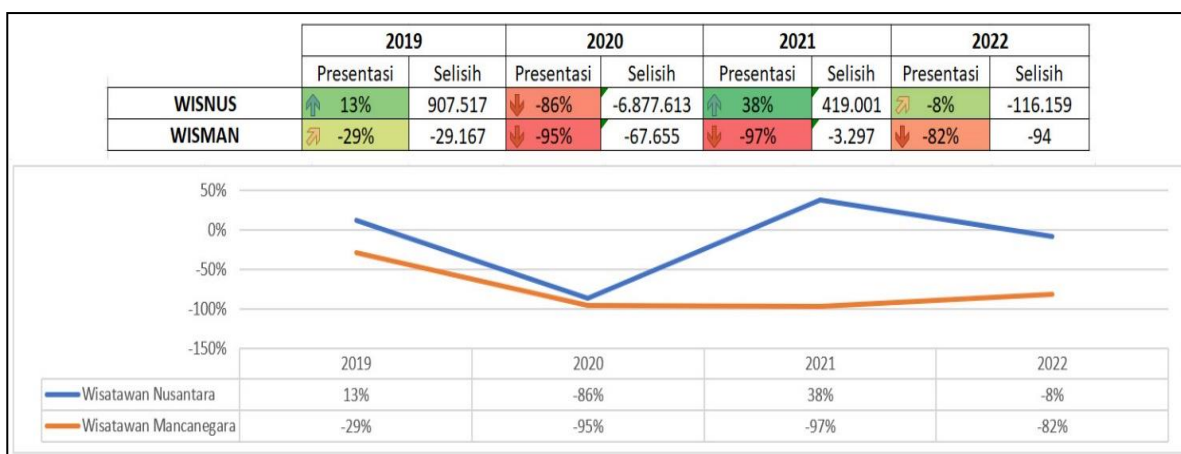
- Metode kunjungan kerja ini yaitu melakukan pertemuan dengan:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
 - b. Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Pemda Kabupaten Malang.

- c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
- d. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kabupaten Malang.
- e. Camat Kecamatan Turen.
- f. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Malang.
- g. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Kabupaten Malang antara lain:
 - Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI);
 - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
 - Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA);
 - Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI);
 - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI);
 - Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO);
 - Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI);
 - Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI);
 - Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI);
 - Hotel *Human Resources Managers Association* (HHRMA);
 - Himpunan Penulis Pariwisata (HPP);
 - Generasi Pesona Indonesia (GenPI);
 - Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia (HMPI).

II. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI

1. Data kedatangan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Malang Jawa Timur sejak 2019 hingga tahun 2022:

No	Bulan	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		JUMLAH	
		WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN
1	Januari	822.185	3.331	157.856	1698	180.906	6	284.342	-	1.445.289	5.035
2	Pebruari	666.272	4.444	109.664	979	140.581	14	194.309	-	1.110.826	5.437
3	Maret	583.646	4.999	27.089	714	200.810	63	221.642	6	1.033.187	5.782
4	April	660.276	4.771	-	0	144.187	14	45.890	8	850.353	4.793
5	Mei	304.440	3.525	-	0	289.862	5	641.327	7	1.235.629	3.537
6	Juni	806.954	4.080	-	0	235.971	7	17.360		1.060.285	4.087
7	Juli	910.648	7.579	57.865	8	-	0			968.513	7.587
8	Agustus	514.816	9.022	77.803	6	-	0			592.619	9.028
9	September	631.735	4.964	67.113	3	-	0			698.848	4.967
10	Oktober	633.349	6.126	61.511	4	-	0			694.860	6.130
11	Nopember	524.213	7.740	288.367	0	122.956	2			935.536	7.742
12	Desember	921.107	10.486	254.760	0	205.756	4			1.381.623	10.490
	Jumlah	7.979.641	71.067	1.102.028	3.412	1.521.029	115	1.404.870	21	12.007.568	74.615



2. Data data mengenai tingkat okupansi hotel dan penginapan dari tahun 2019-2022.

No	Hotel/Penginapan	Jumlah Kamar	Kamar Terpakai Dalam Setahun Tahun 2019	Kamar Terpakai Dalam Setahun Tahun 2020	Kamar Terpakai Dalam Setahun Tahun 2021	Kamar Terpakai Dalam Januari-April Tahun 2022
1	Shanaya Resort	39	18.634	1.880	2.808	1.120
2	El Grande Hotel	103	15.937	4.501	6.491	1.723
3	Hotel Fariz	36	7.961	828	1.728	452
4	Hotel Solaris	103	28.765	2.344	4.944	1.385
5	Hotel Mirabel	65	13.692	150	260	540
6	Hotel D'shario	28	4.879	100	120	210
7	Hotel Cakra Residence	45	19.892	1.423	2.700	834
8	Hotel Bess Resort and Waterpark	128	38.690	765	1.200	1.671
9	Hotel Waringin Anom	45	1.543	121	180	85
10	Hotel Kapal Garden	45	25.670	376	540	223
11	Hotel Tidar	40	11.530	98	276	120
12	Hotel Grand Pujon View	125	30.654	876	1.440	1.840
13	Selorejo Hotel & Resort	105	28.637	65	156	167
14	Hotel Yno Castle	60	9.560	68	144	87
15	Paradiso Hotel	20	13.432	156	240	108
16	Bwalk Hotel	120	13.456	86	132	58
17	Hotel Rolas	46	30.500	295	480	1.756
18	Villa Buah Naga	28	3.560	74	180	56
19	Hotel Niagara	14	1.565	69	110	34
20	Griya Putri Utari	15	15.200	63	120	83
21	Hotel Arjuno	23	13.520	84	100	130
22	Hotel Radho Syariah	130	21.100	132	250	210
23	Hotel Rayz	153	28.136	976	1.440	823
TOTAL		1516	396.513	15.530	26.039	13.715

3. Pandemi *Covid-19* sangat berdampak terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Malang khususnya terkait tenaga kerja (SDM) dan pelaku pariwisata, dimana banyak pelaku usaha pariwisata yang melakukan pengurangan tenaga kerja akibat dari kurangnya wisatawan yang berkunjung atau pembeli dan banyak pula yang menutup usahanya. Hal ini antara lain berakibat banyaknya tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya, banyak pula yang beralih profesi sebagai tukang ojek *online*, petani dan sebagainya yang berakibat penurunan kunjungan wisata dan usaha pariwisata di Kabupaten Malang.
4. Kondisi sektor atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) pariwisata di destinasi wisata alam dan wisata sejarah Kabupaten Malang masih ada, akan tetapi tidak seatraktif sebelum pandemi Covid 19. Dengan mulai melandainya Covid-19, atraksi di daya tarik wisata, didorong dan dimotivasi agar tetap eksis dan dapat nilai tambah dari wisatawan yang berkunjung. Terkait aksesibilitas menuju daya tarik wisata masih relatif aman dan dapat dilalui oleh wisatawan, meskipun masih ada kegiatan pembenahan. Hal itu dalam rangka rehabilitasi dan penambahan kapasitas aksesibilitas menuju tempat wisata dan diharapkan dapat bermanfaat pada saat melandainya

Covid-19. Sementara amenities pada saat Covid-19, tidak semua mengalami penurunan yang tajam bahkan ada daya dukung amenities terpuruk dan sampai sekarang tidak bangkit lagi, ada beberapa amenities yang mendukung daya tarik wisata masih bertahan dan ada juga yang melakukan pembenahan untuk persiapan apabila Covid-19 melandai, bahkan di Desa Wisata Adat Ngadas dan Desa Wisata Gubug Klakah mendapat bantuan pembangunan Homestay dari Kementerian PUPR RI.

5. Pengembangan wisata di Kabupaten Malang tidak terlepas dari misi Bupati Malang dengan memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan agar tercipta masyarakat Kabupaten Malang yang makmur. Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam rangka pengembangan destinasi wisata terkait kesiapan transportasi dan infrastruktur di destinasi wisata:
 - Prioritas yang mendukung Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru mulai penataan dan pengelolaan alat transportasi serta peningkatan kualitas jalan.
 - Fasilitasi dalam rangka pengembangan infrastruktur di destinasi wisata baik dari masyarakat (swadaya) ataupun dari swasta (CSR).
 - Koordinasi mantap kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka kemudahan aksesibilitas menuju destinasi wisata sehingga wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara nyaman melakukan wisata.

Selain hal tersebut, dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan pariwisata daerah adalah dengan melakukan strategi promosi melalui media digital. Strategi promosi digital dirasa efektif dalam mempromosikan destinasi wisata di berbagai platform media sosial karena harganya yang lebih murah dan jangkauannya pun lebih luas sehingga bukan hanya sekadar mengenalkan, tetapi juga dapat menyebarkan potensi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Sedangkan dari sisi SDM pariwisata, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mendukung pemulihan SDM Pariwisata pasca pandemi Covid-19, dengan memberikan pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang kepermanduan, kuliner, kria serta sektor yang lainnya yang mana dengan harapan kedepan bisa menunjang pertumbuhan perekonomian melalui sektor pariwisata di Kabupaten Malang.

Dalam hal pengembangan wisata sejarah guna mendukung pengembangan kepariwisataan adalah melalui program penguatan permuseuman. Hal ini dikarenakan museum adalah sebuah tempat yang menyajikan informasi kesejarahan yang edukatif sekaligus rekreatif. Dalam masa pandemi museum bisa dikunjungi secara virtual dan pasca pandemi, museum bisa dikunjungi langsung. Program-program dari Museum Singhasari ditujukan untuk menarik perhatian generasi muda sehingga mau berkunjung ke museum. Program ini mencakup pengembangan yang bersifat materiil dan imateriil.

6. Biaya dan target realistis pendapatan yang akan dicapai terkait pariwisata desa wisata di Kabupaten Malang pada tahun 2022 ini seyogyanya dapat

diraih semaksimal mungkin untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah, tergantung dari kesiapan dan promosi desa wisata dalam menerima kunjungan wisatawan. Terlebih pada saat ini dimana Indonesia sudah menuju ke arah endemi, sehingga destinasi pariwisata khususnya desa wisata sudah mulai bergeliat. Sehingga memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk memberikan pelayanan atau *hospitality* yang baik kepada wisatawan, serta harapannya dapat memenuhi target Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Asli Desa.

7. Dukungan untuk pengembangan SDM, industri dan kelembagaan di Kabupaten Malang untuk destinasi wisata, diantaranya, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan sosialisasi, pembinaan serta peningkatan kapasitas/SDM pengelola daya tarik wisata melalui beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan destinasi wisata serta dengan memberikan pelatihan SDM pariwisata yang bersertifikasi dengan bersinergi dengan lembaga sertifikasi yang berlisensi, serta memberikan pelatihan digital promosi.
8. Kendala dan solusi Pemerintah Daerah atas berbagai persoalan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Malang, antara lain:
 - a. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Malang antara lain: sebagian besar lokasi destinasi wisata ada di wilayah penguasaan Perum Perhutani sehingga ada keterbatasan manakala Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas destinasi wisata; konsep pariwisata di Kabupaten Malang adalah pariwisata yang berbasis masyarakat (Community Based Tourism) sehingga harus ada upaya untuk meningkatkan SDM terkait tata kelola pariwisata yg baik; potensi lokal yang belum tergalih dengan optimal padahal potensi destinasi wisata sangat mendukung; kesadaran dan peran serta masyarakat masih sangat minim.
 - b. Solusi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah berusaha untuk memetakan potensi dan kebutuhan masyarakat dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi wisata dengan berkegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Pariwisata, Peningkatan Kapasitas Pengelola DTW, Peningkatan SDM Pelaku Wisata, serta peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan destinasi wisata seperti Kelompok Sadar Wisata, Pengelola Desa Wisata, dll.
9. Kesiapan mitigasi bencana Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung keberadaan dan pengembangan destinasi wisata, menunjukkan bahwa daya tarik wisata sudah ada rambu-rambu manakala ada bencana dan sudah ada petugas yang sudah dilatih oleh baik BPBD Propinsi maupun Kabupaten, petugas pengawas yang selalu mengawasi pergerakan wisatawan di tiap destinasi wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sudah melakukan kegiatan yang di dalamnya ada materi kebencanaan dan penanggulangannya. Kedepan

tidak hanya sekedar sosialisasi saja, tetapi akan dilatih sehingga outputnya bisa berupa SOP atau Tim yang menangani kebencanaan.

10. Peran serta masyarakat/swasta didorong terus dalam rangka memperkuat di sektor atraksi, aksesibilitas dan amenities di bidang masing-masing baik itu berbentuk CSR atau pola kemitraan dalam pengembangan destinasi wisata alam dan wisata sejarah. Hal mana dalam pengembangan destinasi wisata telah terbentuk desa-desa wisata dan adanya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat selain juga semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengamankan dan melaporkan benda-benda diduga cagar budaya kepada instansi yang menangani. Masyarakat sebagai wisatawan juga dituntut untuk ikut menjaga tinggalan arkeologis yang dimanfaatkan sebagai atraksi wisata dengan mematuhi peraturan kunjungan. Namun dalam pengelolaan pariwisata maka peran tidak hanya dilakukan satu pihak (masyarakat/swasta) tapi semua aspek pendukung yang terlibat dalam rangka menciptakan sinergitas dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan sehingga memberikan keuntungan serta manfaat pada masyarakat hingga lingkungan. Maka dari itu diperlukan optimalisasi peran serta kolaborasi pentahelix antara bisnis, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media.
11. Kendala dan solusi swasta dan masyarakat di daerah atas pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang, adalah:
 - a. Untuk kendala swasta dan masyarakat di daerah atas pengembangan pariwisata, sesuai dengan tupoksi yang masih terfokus pada pengembangan SDM Pariwisata dengan melalui kegiatan pelatihan kompetensi serta uji kompetensi yang bersinergi dengan Lembaga sertifikasi profesi, dan belum bergerak pada Investasi dalam hal ini bersinergi dengan pihak swasta (Investor).
 - b. Solusi dalam hal ini adalah memberikan kemudahan proses Perizinan Sektor Pariwisata guna meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Malang.
12. Harapan/usulan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat terkait kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan pariwisata di daerah, adalah:
 - a. Harapannya bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI hendaknya memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pariwisata harus diimbangi dengan kemajuan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebagai tolok ukur keberhasilan pariwisata Indonesia. Jadi, perlunya peningkatan pariwisata dengan berbasis masyarakat. Strategi terbaik untuk mengembangkan pariwisata dengan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara meningkatkan kemajuan Desa Wisata.
 - b. Banyak hal positif yang mampu diperoleh dari pengembangan desa wisata. Dengan pengembangan desa wisata, maka partisipasi masyarakat di sekitarnya diberdayakan semaksimal mungkin. Perlu diketahui bahwa pengembangan desa wisata berarti pengembangan

pariwisata yang melibatkan sumber daya masyarakat yang ada di kawasan wisata dan sekitarnya.

- c. Dukungan Pemerintah Pusat untuk membantu para pelaku SDM ekonomi kreatif dan SDM pariwisata di Kabupaten Malang, dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan kompetensi melalui pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi.
- d. Terkait pengembangan wisata sejarah di Kabupaten Malang, diharapkan ada bantuan guna menambah koleksi sebagai bahan kajian dan sebagai penggerak wawasan sejarah budaya kepada masyarakat luas.
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Petugas/ASN di daerah yang menangani Kepariwisata juga perlu perhatian, karena disamping bisa menyelaraskan perencanaan sampai dengan hasil akhir pengembangan destinasi wisata, petugas perlu apresiasi/penghargaan krn telah mengembangkan destinasi wisata yang potensial.

III. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan **Nurchahyo, S.H., M.H.** Menyampaikan sambutan tertulis dari Bupati Kabupaten Malang, diantaranya menyampaikan bahwa:
 - a. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang; Kabupaten Mojokerto; dan Kabupaten Pasuruan; di utara, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kota Batu, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat.
 - b. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang tahun 2021, penduduk kabupaten Malang berjumlah 2,6 juta jiwa (2021), dengan kepadatan 752 jiwa/km².
 - c. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang antara lain dari pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, pertambangan dan pariwisata. Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Malang adalah pariwisata alam, pariwisata pantai, pariwisata budaya, pariwisata minat khusus, agrowisata dan rekreasi.
 - d. Perencanaan wisata yang dilakukan telah dilakukan terutama sejak Covid-19 mereda, mengingat penurunan jumlah kunjungan pariwisata selama pandemi hingga 96,63%. Seiring terkendalinya pandemi, antusiasme wisatawan membaik. Beberapa tempat wisata yang diminati adalah pantai, desa wisata, dll. Beberapa daerah kunjungan wisata favorit, yaitu di Pujon Kidul, Desa Wisata Sanankerto, kawasan BTS (bromo Tengger Semeru), dan pantai selatan.
 - e. Beberapa fasilitas investasi yang dikelola, antara lain (1) kemudahan perizinan, (2) proyek infrastruktur di Malang (tol Malang-Kepanjen), (3)

peningkatan jalan lintas selatan, (4) Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Juga peningkatan infratraktur di BTS.

2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang (Disparbud), **Made Arya Wedanthara**, antara lain menyampaikan:
 - a. Kabupaten Malang telah berusaha untuk merekaveri pariwisata di Malang. Beberapa masalah adalah akses ke arah pariwisata. Ada ribuan kilo, jika memang akses tersebut bisa dibuka.
 - b. Sesuai arahan presiden, membangun dari desa. Beberapa desa wisata telah kami bangun, diantaranya Sanankerto, Pujon Kidul, dll. Ini yang terus dikembangkan sehingga dapat menerima kunjungan dan perekonomian meningkat.
 - c. Sudah ada rencana induk untuk pengembangan wisata. Rencana induk ini masih dalam evaluasi biro hukum gubernur. Ini akan menjadi pedoman tiap lembaga di daerah untuk mengembangkan wisata secara sinergi.
 - d. Wisata dan budaya tidak bisa lepas, oleh karena itu rencana induk ini juga disinkronkan dengan rencana pariwisata dan budaya.
3. Camat Turen, menyampaikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Dorongan dari Pemerintah Daerah maupun Pusat, sudah bisa dilaksanakan, yaitu membangun dari pinggiran. Di Turen bukan hanya Desa Sanankerto saja, tetapi juga ada bangunan-bangunan budaya (Masjid Tiban) yang bisa dijadikan tempat wisata.
 - b. Turen juga akan dijadikan kawasan terpadu, akan dijadikan sebagai warung NKRI. Harapannya jika terwujud, kawasan ini akan berkembang.
 - c. Pada saat pandemi, kas Bumdes Sanankerto sempat minus Rp1 milyar. Hal ini karena karyawan tidak boleh dilepas, tetap digaji sehingga sempat meminuskan anggaran kas Bumdes.
 - d. Beberapa kerjasama dengan Australia pernah dilakukan oleh Bumdes Sanankerto dan mendapatkan anugerah dari ASEAN.
4. Direktur BUMDes Kerto Raharjo, **Syamsul Arifin**, menyampaikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Boon Pring adalah salah satu daya tarik andalan Desa Wisata Sanankerto di Kecamatan Turen. Boon Pring artinya anugerah bambu, yang luasnya sekitar 36,8 hektar yang merupakan tanah kas desa. Pengelolaannya oleh Bumdes, dan bekerjasama dengan Pokdarwis, PKK, dan kelompok tani bambu.
 - b. Sanankerto awalnya desa tertinggal tahun 1993, sekarang sudah desa mandiri. Boon Pring telah berkembang sejak 2017. Dan telah berkontribusi kepada desa. Sejak 2017 ada Rp70 Juta, dan terus naik, hingga ratusan juta pada 2019. Turun di 2020 dan 2021 karena pandemi.
 - c. Semula hanya ekowisata boon pring, dan karena pandemi yang menyebabkan penurunan kunjungan, maka dipikirkan hal lain. Misalnya grosir sembako, kopreasi karyawan dan pedagang, pengelolaan air PAM, BRI Briling, punya EO yang menangani kegiatan masyarakat yang memiliki acara.

- d. Penyerapan tenaga kerja. Sudah ada 100 lebih lapak kior yang masing masing mempekerjakan 2-3 orang, sehingga mampu mencegah orang pindah ke kota. Beberapa pelatihan telah dilakukan sebagai penyangga ekraf di desa.
 - e. Selama pandemi telah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, misalnya Udayana, Brawijaya, LIPI, dan lainnya. Maka ada wisata edukasi dikembangkan. Ada 115 spesies bambu yang dikembangkan.
 - f. Juga dikembangkan embung, dengan ikan endemik, salah satunya ikan dawa. Ikan ini ternyata enak dan dikembangkan menjadi bank ikan.
 - g. Wisata *family gathering* juga dikembangkan, dan masalah sampah yang dihasilkan dapat dijadikan pupuk atau didaur ulang.
5. Dewan Kesenian Malang, **Cokrowibowo**, menyampaikan antara lain:
- a. Mengusulkan agar merubah strategi kepariwisataan, akibat pandemi yang bisa akan terjadi lagi. Bukan wisata buatan yang dikembangkan, namun wisata alam, wisata adat, wisata budaya dan wisata desa. Yang perlu dikembangkan adalah juga wisata cagar budaya.
 - b. Permasalahan yang dihadapi antara lain, kekuatan Perhutani menghambat pengembangan wisata di Pantai Selatan. Ini perlu sinergisitas, dan perlu regulasi, agar Perhutani dapat berjalan dan pariwisata juga berjalan.
 - c. Desa-desa di wilayah KEK, takut kehilangan dengan sumberdaya air. Usulannya perlu membuat waduk resapan, bukan hanya sumur resapan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. KEK berjalan namun desa juga tetap dapat menikmati air.
 - d. Sering terjadinya pergantian kebijakan di pemerintah (pusat) terkait kebijakan Bromo-Tengger-Semeru. Misalnya, daerah Malang di bagian barat BTS, belum tersinergi untuk mendukung pengembangan BTS.
 - e. Karena widata daerah berbasis adat, ritus dan cagar budaya, meka perlu kebijakan pengembangan wisata dengan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah.
6. Ketua Pokdarwis, menyampaikan antara lain sebagai berikut:
- a. Pengembangan SDM sebaiknya bukan hanya pelatihan saja, namun juga pendampingan.
 - b. Pembangunan infrsaturuktur harus terpenuhi, karena mencapai akses ke desa wisata sangat sempit. Jalan harus diperlebar supaya rejeki juga menjadi lancar.
 - c. Menghadirkan transportasi murah. Tansportasi ini penting mengingat untuk mencapai akses ke daerah pariwisata butuh alat transportasi yang cepat dan murah.
 - d. Pokdarwis memerlukan ruangan untuk sekedar sekretariat atau kantor beraktifitas di kantor Kabupaten Malang. Mohon sekiranya Pokdarwis diberikan ruangan.
7. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf/Baparekraf RI, **Dadang Rizki Ratman**, dan Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf RI, **Oneng Setya Harini**, menyampaikan antara lain bahwa:

- a. Apresiasi kepada Kabupaten Malang yang terus mengembangkan potensi pariwisatanya. Pasca pandemi ini, pariwisata harus bangkit. Konsep paling cepat dalam membangkitkan pariwisata adalah kesiapan destinasi, kemudian pelaku wisata diperkuat, dan promosi wisata tetap harus dilakukan.
 - b. Kemenparekraf sejak lama mendukung KEK Singhasari sejak 2019. Tiga tahun ini mulai kita operasikan. Keunggulan KEK ini non-APBN yang dikelola swasta. Namun pemerintah bertugas mendukung infrastruktur akses ke KEK.
 - c. Bidang di KEK yang dikembangkan adalah wisata dan teknologi. Bulan Juli ini akan ada kerjasama dengan UMM Malang, jadi ada wisata edukasi, sehingga masyarakat bisa memperoleh peluang usaha, dll.
8. Komisi X DPR RI melalui, **H. Muhamad Nur Purnamasidi, Desy Ratnasari, Hj. Sakinah Aljufri, Muh. Hasanuddin Wahid, dan Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.**, menyampaikan catatan antara lain:
- a. Terkait regulasi, Komisi X DPR RI tengah menyusun RUU Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Salah satu hal materi muatan yang perlu diangkat adalah tentang kerja sama antardaerah. Kerja sama ini penting, terutama terkait akses ke daerah pariwisata di daerah. Akses antardaerah wisata di Malang dan sekitarnya memang masih menjadi masalah sehingga infrastruktur perlu diperbaiki. Kerjasama wisata antardaerah juga perlu diperkuat, termasuk dalam hal paket wisata, yang memudahkan agen wisata untuk memberikan tawaran bagi wisatawan yang akan hadir.
 - b. Terkait penguasaan wilayah oleh Perhutani, hal ini memang perlu dikerjasamakan dan dikoordinasikan antar K/L. Di Badan Legislasi DPR telah dibahas RUU Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Di RUU ini telah diupayakan agar kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistem ini tidak dikelola secara terpisah, sehingga bisa lebih dikoordinasikan dan dikerjasamakan. Termasuk pengelolaan, kebijakan dan penggunaan anggaran negara untuk konservasi sumberdaya alam ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Malang memiliki destinasi pariwisata yang banyak, utamanya destinasi wisata alam dan wisata sejarah. Selain itu, di Kabupaten Malang juga memiliki destinasi yang masih potensial untuk dikembangkan. Akan tetapi, adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap sektor pariwisata khususnya terkait tenaga kerja (SDM) dan pelaku Pariwisata, dimana banyak pelaku usaha pariwisata yang melakukan pengurangan tenaga kerja akibat dari kurangnya wisatawan yang berkunjung atau pembeli dan banyak pula yang menutup usahanya. Selama pandemi Covid-19, kondisi atraksi, aksesibilitas, dan amenities (3A) pariwisata di destinasi wisata alam dan wisata sejarah Kabupaten Malang masih ada, akan tetapi tidak seatraktif sebelum Pandemi Covid 19.

2. Dalam upaya pengembangan SDM, industri dan kelembagaan pariwisata Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan sosialisasi, pembinaan serta peningkatan kapasitas/SDM pengelola daya tarik wisata melalui beberapa kegiatan yang mendukung pengembangan destinasi wisata serta dengan memberikan pelatihan SDM pariwisata yang bersertifikasi dengan bersinergi dengan lembaga sertifikasi yang berlisensi, serta memberikan pelatihan digital promosi.
3. Beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Malang antara lain sebagian besar lokasi destinasi wisata ada di wilayah penguasaan Perum Perhutani sehingga ada keterbatasan manakala Pemerintah Kabupaten Malang akan melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas destinasi wisata, potensi lokal yang belum tergali dengan optimal padahal potensi destinasi wisata sangat mendukung, dan kesadaran serta peran serta masyarakat masih sangat minim. Selain itu, permasalahan lainnya terkait beberapa wilayah yang minim akses infrastruktur (IT dan fisik).

V. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, dari data, permasalahan dan kesimpulan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Malang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk membantu para pelaku SDM ekonomi kreatif dan SDM pariwisata di Kabupaten Malang, dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan kompetensi melalui pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi, serta pendampingan.
2. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengkaji kembali strategi kepariwisataan, dengan menekankan pengembangan wisata alam, wisata adat, wisata budaya dan wisata desa, serta wisata sejarah.
3. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Kementerian Perhutanan agar perhutani tidak menghambat pengembangan wisata di Pantai Selatan. Dan selanjutnya perlu dilakukan sinergi dengan perhutani agar pengembangan pariwisata dapat tetap berjalan.
4. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan K/L terkait agar Desa-desa di wilayah KEK, dapat dibangun waduk resapan, agar potensi air tidak segera menyusut dikawasan tersebut.

VI. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Malang Jawa Timur dalam rangka peninjauan bidang pariwisata, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 19 Juni 2022

**Ketua Tim/
Anggota Komisi X DPR RI**

Ttd.

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.
A-507